

HUBUNGAN KARAKTERISITIK KOMITE AUDIT TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2012

Pamella Treskawati

Akuntansi Keuangan / Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya
Pamella.treskawati@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap krisis keuangan. Karakteristik komite audit meliputi ukuran, Independensi, frekuensi rapat dan pengetahuan di bidang akuntansi atau keuangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2010 hingga tahun 2012 yang diambil berdasarkan sampling sejumlah 228 perusahaan, dimana terdapat 39 perusahaan yang mengalami krisis keuangan, sedangkan sisanya adalah tidak krisis keuangan. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan pengujian logistik regresi biner dapat disimpulkan bahwa karakteristik komite audit yaitu ukuran, Independensi, frekuensi rapat dan pengetahuan di bidang akuntansi atau keuangan. tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap krisis keuangan

Kata kunci : ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi rapat dan pengetahuan di bidang akuntansi atau keuangan, krisis keuangan.

Abstract : This study aimed to examine the effect of the characteristics of the audit committee financial distress. Characteristics of audit committee include Size, Independence, meet and literacy. The data used are secondary data obtained from financial reports companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2010 through 2012 were taken by purposive sampling of some 228 companies, of which there are 39 companies experiencing financial distress, while the rest are non-financial distress. Based on the results of data analysis using binary logistic regression testing, it can be concluded that the characteristics of the audit committee Size, Independence, meet and literacy does not have a significant influence on financial ditress.

Keywords: *size of audit committee, independence of audit committee, frequency of audit committee meeting, financial literacy of audit committee dan financial distress.*

PENDAULUAN

Masalah agensi yaitu perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent* yang diyakini sebagai basis dari perilaku manipulasi laporan keuangan oleh manajemen kepada prinsipal. Akibat aksi perubahan metode-metode akuntansi tersebut memberikan dampak yang luas dalam jangka panjang hingga terjadinya masalah krisis keuangan. Terlebih fungsi dari audit internal dirasa belum berjalan optimal mengingat secara struktural, auditor internal berada pada posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif.

Faktor *financial distress* dapat dipicu oleh faktor eksternal (bencana alam) atau internal (kesalahan manajemen). *Financial distress* terjadi disaat perusahaan mengalami

kesulitan dana untuk menutupi kewajiban maupun likuidasi yang diawali dari tingkat kesulitan ringan hingga yang lebih serius seperti besarnya hutang yang melebihi aset. Dampak dari *financial distress* tersebut akan dirasakan oleh pengelola, pemegang saham hingga kreditur. Pada dasarnya kegagalan strategi maupun praktik kecurangan manajemen puncak berlangsung dalam waktu yang cukup lama akibat lemahnya pengawasan yang independen dari *corporate boards* (Kaihatu, 2006). Seperti kasus Enron terjadinya kesulitan keuangan akibat lemahnya tatakelola manajemen, para direktur non eksekutif terganggu oleh konflik kepentingan dan akibatnya komite audit gagal menjalankan fungsinya sebagai pengendali internal. (Leung *et.al*;2003).

Kepercayaan *principal* terhadap keberadaan komite audit akan berpengaruh pada nilai perusahaan, dan pasar akan bereaksi ketika pergantian komite audit dalam frekuensi yang tinggi (Sanjaya; 2008). Umumnya efektifitas komite audit dilihat pada kualitas pelaporan (Abbott and Parker,2000; Kalbers and Fogarty,1993; Ruzaidah dan Takiah,2004 dalam Rahmat *et.al.* 2009), laporan kecurangan (*fraudulent reporting*) (Menon dan Williams,1994 dalam Rahmat *et.al.* 2009), kualitas audit (Ali, 1990 dalam Rahmat *et.al.* 2009) atau pemilihan auditor eksternal (Kunniake,1981; Einchenseher dan Shields,1985; Cottell dan Rankin,1988; Takiah dan Wan-Zanani,2004 dalam Rahmat *et.al.* 2009). Kini regulator perusahaan maupun profesi akuntansi merekomendasikan beberapa karakteristik komite audit sebagai saran atas indikator keefektifitasan komite audit agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya agar mencapai pada tujuan dan kualitas yang diharapkan terkait karakteristik komite audit seperti independensi, keahlian, *size*, dan tingkat aktivitas audit komite (Baxter; 2010).

Saat ini, *Good Corporate Governance* (GCG) dipercaya sebagai sistem yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan *value* dan memperbaiki kinerja lini perusahaan (Seog, 2007 dalam Ellen 2013). Diharapkan Penerapan GCG yang terdiri dari *transparency*, *responsibility*, *accountability*, dan *fairness* mendorong persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif terlebih menunjang stabilitas ekonomi yang berkesinambungan (KNKG;2006). Tujuan dari konsep GCG adalah pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, tepat dan menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan mengungkapkan secara tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder (Kaihatu,2006).

Dengan penerapan *Good corporate Governance* diakui dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerjanya hingga 30% dan menghilangkan konflik yang timbul untuk mensejahterahkan shareholders. Selain itu, menurunkan perilaku manajer puncak untuk memaksimalkan kepentingan pribadi (Ellen 2013). Hal tersebut didukung dari pendapat Wathne dan Heide (2000 dalam Rahmat *et.al* 2009) dengan pembentukan komite audit sebagai salah satu komponen GCG, akan kembali pada tujuan awal *corporate* yaitu fokus pada optimalisasi kekayaan pemegang saham dan moral hazard yang dilakukan manajemen puncak karena komite audit sebagai faktor penentu dalam menentukan sejauh mana skandal itu terjadi. Sehingga apabila komite audit berjalan efektif, perlakuan manipulasi *cash flow* dari manajer menjadi rendah dan mengembalikan investor untuk tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan (Garay dan Gonzales,2008 dalam Ellen, 2013).

Putusan BAPEPAM Nomor IX.I.5: KEP-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004 terkait pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit tersebut menekankan bahwa komite audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya bertindak secara independen dalam melaksanakan pengawasan dan memantau terhadap penyusunan laporan keuangan, pengelolaan resiko serta control pada *corporate governance*, memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, dan menjadi jembatan penghubung komunikasi antara manajemen dengan audit internal maupun eksternal.

Komite audit diindikasikan sebagai bagian dari kepemimpinan strategi perusahaan sehingga kontribusinya sangat penting bagi keberhasilan perusahaan (De Zoortet.al 2002 dalam Rahmat *et.al* 2009). Oleh karnanya efektifitas komite audit berkorelasi terhadap kemakmuran atau kesulitan keuangan melalui kompetensi yang dimiliki komite audit itu sendiri. Komite audit yang efektif akan berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan, daya saing dan dianggap mampu mengurangi masalah keagenan untuk mencegah manajemen puncak melakukan tindakan yang memaksimalkan kepentingan pribadi mereka, dimana jika hal tersebut terjadi secara terus menerus akan menyebabkan *financial distress* bagi perusahaan (Wathne and Heide, 2000 dalam Rahmat *et.al* 2009).

Komite audit membantu shareholder dalam memonitor aktivitas para agen dan mengurangi pencapaian keuntungan dari asimetri informasi yang ada (Hashim dan Rahman, 2011). Selain itu,dengan membentuk komite audit yang independen akan membantu dalam pengawasan dan mencegah ataupun mengurangi terjadinya *earning management*,*financial reporting restatement* dan *financial reporting fraud*. (Abbott,Parker and Peters,2004). Oleh

karena itu komite audit yang efektif dan efisien diperlukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.(Klein,2002)

Kurangnya kompetensi yang dimiliki komite audit dapat menyebabkan *financial distress*, tetapi komite audit yang berkompoten memiliki kapasitas untuk mampu menekan kondisi *financial distress* (McMullen and Raghunandan,1996 dalam Rahmat *et.al* 2009). Komite audit memiliki peran penting dalam pengawasan operasional perusahaan, sistem pengendalian internal dan berkontribusi pada pengembangan rencana perusahaan. Selain itu komite audit juga diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pimpinan terkait hal keuangan atau operasional (Charan, 1998; Craven and Wallace, 2001 dalam Rahmat *et.al* 2009).

Diharapkan dengan memiliki karakteristik yang baik bagi komite audit akan memiliki hubungan untuk meningkatkan performa kinerja keuangan perusahaan, dengan adanya performa kinerja yang baik maka dapat menekan *financial distress*. Efektifitas komite audit dalam penelitian ini dilihat pada karakteristik komite audit yang seharusnya mampu menghindari perusahaan dari kondisi *financial distress* melalui kompetensi peran komite audit dan tanggung jawab komite audit untuk menjamin kemakmuran bisnis.(Rahmat *et.al*,2009)

Karakteristik komite audit yang efektif meliputi:

1. **Size**; Untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab komite audit, komite audit juga harus memiliki anggota yang cukup (Vinten and Lee, 1993 dalam Rahmat *et.al* 2009). Menurut Pincus *et.al* 1989; Eincherseher and Shields(1985 dalam Rahmat *et al* 2009), teori Dalton *et.al* (1999 dalam Rahmat *et.al* 2009) memiliki hubungan yang lemah sebagai fungsi pengawasan dalam hal Keefektifan komite audit dengan ketidak bergantung pada ukuran jumlah anggota yang terlalu besar ataupun terlalu kecil, terkait jumlah yang terlalu besar cenderung kehilangan fokus dan kurang partisipasi, terlebih bila memiliki ukuran komite yang kecil juga tidak akan efektif, tetapi perlu berdasarkan pada ketepatan jumlah anggota yang dibutuhkan dan mampu menggunakan pengalaman,pengetahuan serta keahlian mereka untuk kepentingan *stakeholder*. Menurut Pierce and Zahra (1992 dalam Rahmat *et.al* 2009) ada hubungan signifikan negatif antara efektifitas komite audit dengan ketergantungan sumber daya apabila perusahaan meningkatkan sumber daya anggota komite audit maka akan turut meningkatkan performa kinerja perusahaan dalam menangani masalah-masalah yang di hadapi perusahaan sehingga mampu menghindarkan perusahaan dari masalah kesulitan keuangan dari banyaknya jumlah pengawas. Sumber daya berhubungan signifikan memperkecil

terjadinya *earning management* dan *qualified audit opinion* pada laporan keuangan (Yan and Krisman, 2005 dan Pucheta Martinez and Fuentes, 2007)

H1: Ada hubungan negatif yang signifikan antara ukuran audit komite dan *financial distress*.

2. ***Independence***; Menurut Carcello dan Nael, (2000 dalam Rahmat *et.al* 2009) komite audit yang berindependensi memiliki hubungan negatif terkait kelangsungan hidup perusahaan yang mengalami *financial distress*. Tujuan independensi komite audit adalah tidak ada dalam bagian dari pemegang saham atau jajaran dari manajemen yang dapat menimbulkan *conflict of interest*, tanpa prosedur kontrol yang independen dan efektif, manajemen puncak perusahaan akan selalu tergoda untuk menyimpang dan tidak melindungi *stakeholders* (Fama dan Jensen, 1983). Keberadaan komite audit yang independen memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan (Beasley, 1996 dalam Rahmat *et.al* 2009). Dengan independensi, komite audit mampu mengoptimalkan dalam monitoring dan memberikan kritik terkait kebijakan manajemen sehingga komite audit mampu mengurangi kemungkinan laporan keuangan yang dimanipulasi. (McMullen and Raghunandan, 1996 dalam Rahmat *et.al* 2009). Porter and Gendall, (1993 dalam Rahmat *et.al* 2009) menilai setidaknya jumlah komite audit yang harus dimiliki sekurangnya 3 orang dengan mayoritas memiliki independensi.

H2: Ada hubungan negatif yang signifikan antara independensi komite audit dan *financial distress*.

3. ***Meet***; frekuensi pertemuan memiliki hubungan yang negatif signifikan dengan keefektifan kinerja komite audit (Collier and Gregory, 1999; Song and Windram, 2000 dalam Rahmat *et.al* 2009). Berdasarkan penelitian McMullen and Raghunandan, (1996 dalam Rahmat *et.al* 2009) perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan jarang melakukan pertemuan komite audit seintensif perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Menurut Abbott dan Hughes, (1999 dalam Rahmat *et.al* 2009) dengan pertemuan yang rutin dan terkontrol tersebut akan membantu komite audit untuk memeriksa *akuntansi*, sistem pengendalian internal manajemen dan direktur eksekutif dapat memberikan penjelasan terkait isu-isu yang mungkin akan terjadi di masa mendatang sehingga dapat meminimalisasikan resiko yang menimbulkan *financial distress* akibat faktor internal maupun ancaman external. Diskusi yang dilakukan dalam setahun dari hasil pengawasan komite audit mampu mencegah *fraudulent financial reporting* dan *financial reporting restatement* (Abbott *et.al* 2004, Vafeas 2005). Setidaknya pertemuan tersebut dilakukan 3 hingga 4 kali dalam setahun dengan

terstruktur dan terkontrol oleh ketua komite. (Hughes, 1999; McMullen dan Raghunandan, 1996 dalam Rahmat *et.al* 2009).

H3: Ada hubungan negatif yang signifikan antara frekuensi pertemuan komite audit dan *financial distress*.

4. **Literacy**; komite audit menjadi efektif apabila komite audit tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman terhadap keuangan atau akuntansi secara profesional sebab memiliki latar belakang pendidikan menjadi karakteristik yang penting untuk mendukung perannya (Hambrik dan Mason, 1984 dalam Rahmat *et.al* 2009). Sehingga pada praktiknya diharapkan mampu mengadopsi standar akuntabilitas yang tinggi untuk mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami *financial distress* melalui kontribusinya sebagai pengendali dan pemantau kinerja perusahaan yang berkualitas (McMullen and Raghunandan, 1996 dalam Rahmat *et.al* 2009). Shamsul dan Abdul Latif (1997 dalam Rahmat *et.al* 2009) dan Kalbers (1992 dalam Rahmat *et.al* 2009) setuju dan membuktikan bahwa kinerja komite audit memburuk ketika komite audit kurang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi atau keuangan. Menurut Felo dan Solieri (2009) komite audit yang berkeahlian dalam keuangan wajib memiliki sertifikasi profesional di bidang akuntansi atau berlatar belakang di bidang keuangan. Komite audit yang berpengalaman di bidang keuangan terlebih bersertifikat *Certifies Public Accountant* memungkinkan menurunkan masalah keuangan dan kemungkinan terjadinya *internal control deficiency* (Zhang, Zhou dan Zhou, 2007). Kompetensi terhadap pemahaman standart akuntansi tersebut, mampu mengurangi biaya *substantive test of control* dari auditor eksternal, terbukti sedikit bukti pelanggaran dan menguntungkan bagi perusahaan (Turel, 2010)

H4: Ada hubungan negatif yang signifikan antara *financial literacy* dari anggota komite audit dan *financial distress*.

Dari pengamatan yang dilakukan OJK di tahun 2013 terhadap penerapan komite audit di seluruh emiten di Indonesia, ternyata ditemukan masih banyak *corporate* yang kurang taat pada ketentuan kriteria prasyarat aturan pembentukan komite audit untuk menjadi anggota komite audit itu sendiri. Dalam contohnya seorang Ketua komite audit suatu *corporate* adalah salah satu komisaris, sedangkan anggotanya adalah teman satu kolega dari komisaris, selain itu diketahui para anggota dari komite audit menjabat lebih dari 2 emiten. (Ilya 2013).

Hingga tahun 2013, Indonesia telah memiliki 450 emiten dan anggota Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) berjumlah 300 orang, yang mana seharusnya jumlah anggota IKAI yang tercatat adalah 1.700 orang apabila di setiap emiten mematuhi aturan dari Bapepam agar sedikitnya memiliki tiga orang komite audit. Menurut Ketua IKAI Gatot

Triharjo, Banyaknya komite audit yang merangkap di banyak emiten lain adalah hal yang wajar dikarenakan faktor independensi komite audit yang tidak bekerja penuh namun cukup datang dua hingga tiga kali dalam sebulan selama kecukupan waktu yang diberikan tidak mengurangi kualitas dari tugas komite audit. Gatot Triharjo menambahkan, OJK haruslah melihat pendapatan atau imbal hasil kerja yang diberikan satu emiten kepada anggota komite audit, apabila memadai atau mencapai 75% dari pendapatan total maka memungkinkan bagi seorang komite audit untuk berkerja dalam satu emiten. (www.mappijatim.or.id)

Dalam penelitian Emrinaldi (2007), ukuran komite audit (*size*) tidak berhubungan signifikan terhadap *financial distress* namun menurut Felo *et.al* 2003 (dalam Kang *et.al* 2011) mengungkapkan semakin besar jumlah komite audit akan meningkatkan kualitas pelaporan, hal tersebut serupa dengan hasil penelitian Pierce dan Zahra (1992 dalam Rahmat *et.al* 2009) bahwa ada hubungan signifikan negatif ukuran komite dengan *financial distress*. Untuk independensi komite audit menurut McMullen dan Raghunandan, 1996 (dalam Rahmat *et.al* 2009) menunjukkan ada hubungan negatif dengan terjadinya *financial fraud*. Namun hal ini bertentangan dengan Nuresa (2013) dan Rahmat *et.al* (2009) bahwa independensi tidak memiliki hubungan terhadap *financial distress*.

Pada penelitian Collier dan Gregory, 1999, Song and Windram 2000 (dalam Rahmat *et.al* 2009) dan Nuresa (2013), menyatakan frekuensi pertemuan memiliki hubungan yang signifikan negatif dengan *financial distress*, namun pengungkapan yang berbeda dari penelitian Rahmat *et.al* (2009) di Malaysia menyatakan frekuensi rapat tidak ada hubungan dengan *financial distress*. Untuk keahlian dan pengetahuan komite audit di bidang akuntansi atau keuangan, menurut Rahmat *et.al* (2009), pengetahuan komite audit berhubungan secara signifikan positif terhadap *financial distress*. Hasil uji yang sama lainnya, namun bersignifikan negatif dari penelitian Krishnan (2008), Visvanathan (2008), Mangena dan Pike (2005); dalam Kang *et.al* (2011) terkait kemampuan menekan *earning management* dan memberikan kualitas laporan yang lebih tinggi.

Kesadaran akan pentingnya komite audit merupakan titik tolak penulis merasa tertarik melakukan penelitian pada negara Indonesia dan penelitian ini akan menggunakan sampel perusahaan yang mengalami tanda-tanda *financial distress* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Pemilihan penelitian pada industri yang berbasis *customer goods* dan *capital goods* tersebut karena dalam beberapa tahun terakhir industri tersebut telah menghadapi persaingan yang ketat baik dalam negeri dan juga antar negara akibat perjanjian ACFTA (*ASEAN-CHINA free trade area*) semenjak januari 2010. Dari hasil pengamatan kementerian perindustrian menunjukkan 5 sektor industri seperti

elektronik, *furniture*, logam dan produk logam, permesinan, tekstil dan produk tekstil menjadi terpuak akibat daya saing penjualan dan presentase ekspor Indonesia ke RRC yang lebih rendah dari import barang Cina yang masuk ke Indonesia, terlebih adanya praktik dumping dari produk Cina. (www.kemenperin.go.id)

Disisi lain bahan baku yang masih bergantung pada impor, keterbatasan pasokan listrik dan kondisi mesin yang tua menjadi hambatan yang berkorelasi pada penurunan produksi, penjualan, keuntungan, pengurangan tenaga kerja, serta peningkatan harga import bahan baku terutama di sektor elektronik dan garmen. Keengganan investasi asing akibat keterbatasan energi listrik dan bea masuk bahan kimia yang tidak diproduksi dalam negeri sebesar 5% turut menjadi permasalahan sehingga dalam praktik jangka panjang, hal tersebut dapat mempengaruhi eksistensi perusahaan yang apabila tidak dapat bertahan akan mengakibatkan *financial distress* lalu berujung pada kebangkrutan. (*Indonesian Commercial Newsletter*).

Pada tahun 2010, Negara mencatat defisit tertinggi dalam perdagangan bilateral. Pada tahun 2011 dan 2012 angka defisit mulai turun. Hal itu dikarenakan Cina membuka secara luas pasar komoditas Indonesia untuk meningkatkan ekspor. Oleh sebab itu pemerintahan Indonesia membantu sektor manufaktur dalam segi kemudahan regulasi peraturan, bantuan modal untuk meningkatkan kualitas dan harga produksi demi pencapaian perdagangan Bilateral pada tahun 2012 mencapai harapan US \$ 80 Milliar. Dengan demikian penelitian ini layak diteliti lebih jauh sebab menjadi hal penting bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan dimasa mendatang.

METODE PENELITIAN

Pemilihan komite audit dengan menganalisis kelengkapan data terkait pada kriteria pada variabel independen yaitu kelengkapan data pada karakteristik komite audit (*size, independence, frequency of meeting, financial literacy*) pengukuran variabel ini menggunakan jumlah komite audit, jumlah independensi komite audit, jumlah frekuensi rapat komite audit dalam 1 tahun, dan pengetahuan serta pengalaman komite audit di bidang akuntansi atau keuangan (Rahmat *et.al* 2009).

Pengklasifikasian perusahaan variabel dependen berdasarkan pada kategori perusahaan yang mengalami *financial distress* dan *non financial distress* dengan memberi label *dummy*. Variabel pada perusahaan dengan ciri-ciri mengalami *financial distress* maka diberi kode 1 dan yang tidak mengalami *financial distress* diberi kode 0. Dasar pemilihan perusahaan yang mengalami *financial distress* jika perusahaan memenuhi salah satu kondisi: mengalami *net*

income negatif selama 1 tahun (Habib *et.al*, 2013), atau *Working capital* negatif dalam 1 tahun (Habib *et.al*, 2013), atau baik *net income* maupun *working capital* nya kedua-duanya negatif selama 1 tahun (Habib *et.al*, 2013), atau EBITDA lebih kecil dari beban bunga selama 2 tahun Pindado *et.al* (2007) dan Tinoco (2013) atau *market value* yang menurun selama 2 tahun Pindado *et.al* (2007) dan Tinoco (2013).

Dibawah ini menyajikan hasil sampel penelitian selama periode 2010,2011, dan 2012:

Pemilihan Obyek Penelitian	Total
Jumlah populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2010-2012	143
populasi yang tidak sesuai dengan kriteria pengambilan sampel:	
1. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan selama atau pada periode 2010 - 2012 secara berturut-turut	(35)
2. Perusahaan yang data komite auditnya kurang lengkap	(13)
3. Perusahaan yang menggunakan mata uang asing	(19)
Jumlah perusahaan yang digunakan dalam penelitian	76
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian (selama 3 tahun)	228
Jumlah tahun perusahaan <i>financial distress</i> 2010 – 2012	39
Jumlah tahun perusahaan <i>non-financial distress</i> 2010 – 2012	189

Sumber: Data Olahan

Total sampel perusahaan yang diteliti selama periode 2010-2012 berjumlah 228 perusahaan. Dari 228 perusahaan tersebut, diketahui bahwa 39 (17,1%) perusahaan manufaktur mengalami *financial distress*, sedangkan perusahaan yang tidak berstatus *financial distress* berjumlah 189 perusahaan (82,9%).

Financial Distress				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Non Financial Distress	189	82,9	82,9	82,9
Financial Distress	39	17,1	17,1	100,0
Total	228	100,0	100,0	

Hipotesis tersebut diuji dengan menggunakan permodelan sebagai berikut:

$$FINDISTRESS^i = \beta_0 + \beta_1 ACSIZE^i + \beta_2 \%ACINDP^i + \beta_3 ACMEET^i + B4ACLITERACY + \epsilon_i$$

Uji Analisis Regresi Logistic Biner (*Binary Logistic Regression*) Dengan SPSS 2.0 for windows

a. Menilai model fit secara keseluruhan (*Overall model fit*).

H0: Model yang dihipotesiskan fit dengan data.

H1: Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data.

-2 Log Likelihood (Block Number = 0)	-2 Log Likelihood (Block Number = 1)
208,643	204,215

Terjadi penurunan yang signifikan sebesar 4,428. Penurunan yang terjadi menandakan model yang dihipotesiskan fit dengan data input. Selain melihat pada nilai -2 Log Likelihood, penilaian pada model juga didukung oleh nilai Overall Percentage yang ditampilkan menghasilkan sebesar 82,9% yang menunjukkan bahwa terdapat kecocokan antara model hipotesis dengan data yang digunakan dalam penelitian.

Classification Table^{a,b}

	Observed		Predicted		
			Financial Distress		Percentage Correct
			Non Financial Distress	Financial Distress	
Step 0	Financial Distress	Non Financial Distress	189	0	100,0
		Financial Distress	39	0	0,0
	Overall Percentage				82,9

b. Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	11,470	6	0,075

Nilai *Chi-square* sebesar 11,470 dengan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,075. Nilai 0,075 tersebut lebih besar dari ketentuan uji *Goodness of Fit Test* yaitu 0,05 berarti model regresi layak digunakan dalam penelitian ini dan mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model dapat diterima

c. Uji Cox & Snell R Square dan Nagelkerke R Square.

Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
0,019	0,032

Hal ini menandakan bahwa *financial distress* (variabel dependen) yang terjadi pada perusahaan manufaktur selama periode 2010 – 2012 yaitu 3,2% berhubungan oleh karakteristik komite audit dan sisanya sebesar 96,8% berhubungan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam variabel penelitian.

HASIL REGRESI LOGISTIK BINER DAN ESTIMASI PARAMETER BESERTA INTERPRETASINYA.

$$y = \frac{P}{1 - P} = e (-18,025 - 0,864 AC SIZE_i - 1,013 AC IND_i - 0,019 AC MEET_i + 19,751 AC LITERACY_i + \epsilon_i)$$

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
SIZE	-0,864	0,764	1,277	1	0,258	0,422
IND	-1,013	2,112	0,230	1	0,631	0,363
Step 1 ^a MEET	-0,019	0,028	0,468	1	0,494	0,981
LITERACY	19,751	20095,890	0,000	1	0,999	378281471,855
Constant	-18,025	20095,890	0,000	1	0,999	0,000

Pengujian hipotesis yang memiliki hubungan tidak signifikan terhadap *financial distress* adalah variabel *SIZE* yaitu 0,258, *IND* yaitu 0,631, *MEET* yaitu 0,494 dan variabel *LITERACY* sebab nilai signifikansinya lebih dari 0,05 terhadap *financial distress*. Dari keseluruhan hasil pengujian hipotesis diatas menunjukkan H1 ditolak dan karakteristik komite audit tidak berhubungan signifikan terhadap *financial distress*.

1. *SIZE* (Jumlah Komite Audit)

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jumlah komite audit memiliki hubungan tidak signifikan terhadap *financial distress*, hal ini dikarenakan jumlah komite audit di Indonesia meskipun telah ada yang mencapai hingga 5 orang anggota tetapi keberadaannya masih belum dapat memberikan kontribusi dan pengaruh bagi perbaikan kinerja keuangan perusahaan sebab penetapan jumlah anggota hanya sebatas mengikuti aturan IX.I.5. KEP 29/PM/2004 oleh Bapepam terkait keberadaan komite audit dan wewenang yang dimiliki komite audit sebatas memberikan pendapat tetapi keputusan akhir ada pada pimpinan perusahaan.

Hasil pengujian penulis ini sama dengan hasil pengujian Rahmat *et.al* (2009), dan Emrinaldi (2007), Nuresa dan Basuki (2013) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berhubungan signifikan terhadap *financial distress* sebab menurut Emrinaldi (2007) hal ini terjadi karena keberadaan komite audit tidak memberikan dampak langsung kepada *financial distress*, selain itu upaya yang dilakukan oleh anggota komite audit hanya sebatas pada pemberian pendapat dan mengikuti aturan Bapepam No. IX.I.5. KEP 29/PM/2004. Sedangkan menurut Nuresa dan Basuki (2013) menyimpulkan bahwa ukuran komite audit tidak

memiliki hubungan terhadap *financial distress* karena kurangnya kemampuan komite audit dalam menunjang efektivitas kinerja yang dikarenakan terdapat beberapa perusahaan memiliki kurang atau lebih anggota komite audit yang tidak efektif mengatasi konflik keagenan.

Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Pierce dan Zahra (1992 dalam Rahmat *et.al* 2009) terkait ukuran komite audit dan kinerja keuangan perusahaan yang didukung dari teori ketergantungan sumber daya, yang menyatakan meningkatnya ukuran komite audit dapat mempengaruhi efektivitas kinerja komite audit sehingga masalah yang dihadapi perusahaan mampu terselesaikan karena setiap anggota komite audit memiliki pengalaman di bidang yang berbeda-beda. Hal serupa dikemukakan Felo *et.al* (2003 dalam kang *et al* 2011) bahwa semakin besar jumlah komite maka akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

2. IND (Independensi Komite Audit)

Hasil pengujian penulis menggunakan *binary logistic* menunjukkan bahwa terdapat hubungan tidak signifikan antara independensi komite audit dengan *financial distress*, sebab kebanyakan perusahaan masih mengikuti peraturan Bapepam No IX.I.5. KEP 29/PM/2004 dan disisi lain masih ada keraguan terkait independensi komite audit di Indonesia terkait pemberian pengawasan dan pengendalian manajemen perusahaan secara penuh, serta proses perekrutan komite audit yang independen masih bersifat tertutup dan bersifat formalitas.

Hasil penelitian ini sama dengan hipotesis yang dilakukan oleh Nuresa dan Basuki (2013) yang menyatakan bahwa besarnya proporsi independensi komite audit tidak mampu mengurangi atau menghindari kondisi *financial distress* akibat lemahnya praktik tata kelola perusahaan di Indonesia terkait keraguan independensi dalam hal memberikan pengawasan dan pengendalian internal terhadap *agent*.

Dengan demikian independensi komite audit dalam penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian McMullen and Raghunan (1996 dalam Rahmat *et.al* 2009) yang menyatakan seharusnya komite audit mampu mempengaruhi, mengoptimalkan monitoring dan bebas dari hubungan yang tidak

indepdededen sehingga mampu memberikan kritik terkait kebijakan manajemen terlebih mengurangi kemungkinan laporan keuangan yang dimanipulasi.

3. *MEET* (Frekuensi Rapat Komite Audit)

Pada penelitian penulis, frekuensi rapat komite audit tidak berhubungan signifikan terhadap *financial distress*, hal ini dikarenakan frekuensi rapat tidak menjamin mempengaruhi bertambah atau berkurangnya *financial distress*, meski telah banyak melakukan aktivitas frekuensi rapat dalam laporan tetapi masih belum mampu menemukan atau memecahkan masalah yang terjadi karena kegiatan rapat yang tercantum pada laporan keuangan kemungkinan hanya bersifat formalitas dan untuk memenuhi ketentuan regulasi No IX.I.5. KEP 29/PM/2004.

Hasil penelitian ini sama dengan Rahmat *et.al* (2009) yang menyatakan baik perusahaan sehat dan yang mengalami krisis keuangan telah memenuhi persyaratan minimum *MEET* pada komite audit yang diatur sesuai praktik tata kelola perusahaan namun hasil menunjukkan pemenuhan frekuensi minimum rapat tersebut sebatas memenuhi tujuan untuk menghindari tindakan hukum dari regulator dan hal tersebut terbukti dari tidak menjalankan rapat secara efektif dan aktif pada perusahaan *non financial distress*. Anjuran standar minimum yang diatur menjelaskan sekurang - kurangnya komite audit melakukan frekuensi rapat sebanyak 3 kali namun standar minimum tersebut tidak dapat sendirinya menjamin efektifitas komite audit mampu menghindari krisis keuangan. Maka teori Collier and Gregory, 1999; Song and Windram, (2000 dalam Rahmat *et.al* 2009) terkait frekuensi pertemuan memiliki hubungan signifikan negatif dengan keefektifan komite audit dalam memonitor lebih baik, tidak dapat dibuktikan.

Hasil pengujian penulis ini berkebalikan dengan hasil pengujian yang dilakukan Collier dan Gregory (1999), Song dan Windram (2000 dalam Rahmat *et.al* 2009), Nuresa dan Basuki (2013) yang menyatakan bahwa *MEET* (frekuensi rapat komite audit) memiliki hubungan signifikan negatif terhadap *financial distress* sebab dengan tingginya frekuensi rapat dapat mengetahui masalah yang terjadi, komite audit yang memiliki pengaruh terhadap keputusan *principal* melakukan pencegahan terhadap perilaku *agent* yang menyimpang sehingga turut mampu meminimalkan terjadinya konflik keagenan.

4. *LITERACY* (Pengetahuan Komite Audit pada Akuntansi atau Keuangan)

Rahmat *et.al* (2009) berpendapat dengan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan secara profesional, diyakini sebagai dasar yang baik untuk menguji dan menganalisis informasi laporan keuangan serta lebih mampu menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan & inovasi. Hasil pengujian penulis menyimpulkan bahwa *LITERACY tidak* memiliki hubungan signifikan terhadap *financial distress*. Secara keseluruhan perusahaan sudah memiliki anggota komite audit yang berpendidikan dan berpengalaman di bidang akuntansi atau keuangan namun tidak memiliki hubungan dan tidak menjamin untuk dapat membantu meminimalkan resiko salah saji laporan keuangan yang ada sebab belum terlihat kontribusinya sebagai pengendali dan pemantau kinerja berkualitas dan sebatas mengikuti aturan Bapepam No IX.I.5. KEP 29/PM/2004.

Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Rahmat *et.al* (2013) yang menyatakan bahwa komite audit memberikan dampak langsung terhadap *financial distress* secara signifikan positif dikarenakan lemahnya pengetahuan dan pengalaman komite audit di bidang akuntansi dan keuangan akibat tidak banyak anggota komite audit yang bersertifikat MIA (*Malaysia Institute of Accountants*). Krishnan dan Visvanathan (2008), Mangena dan Pike (2005); dalam Kang *et.al* (2011) melaporkan bahwa keahlian dalam bidang *financial* berhubungan dengan kejadian penurunan *earning management* serta meningkatkan kualitas pelaporan dengan menggunakan berbagai rating analisis, konservatisme dan pengungkapan laporan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa keempat karakteristik komite audit yaitu *SIZE*, *INDP*, *MEET* dan *LITERACY* tidak ada hubungan signifikan terhadap *financial distress*.

Dengan demikian penelitian ini sebagai pendukung argumen dari penelitian terdahulu bahwa kesulitan keuangan terkait dengan pentingnya karakteristik komite audit terutama pada *Size*, *independensi*, *pertemuan rapat* dan *pengetahuan* di bidang akuntansi atau keuangan (Fama dan Jensen, 1983; Rechner dan Dalton, 1991; Jensen, 1993; Buang 1998 dalam Rahmat *et.al* 2009) dalam menentukan keefektifitasan komite audit untuk dapat menghindari perilaku manajemen yang cenderung untuk memilih atau memiliki keputusan memaksimalkan

kepentingan diri sendiri di banding pada *stakeholders* (Jensen dan Meckling,1976; Jensen 1993) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan dengan efektif terlebih pada perusahaan di Indonesia.

Pembentukan komite audit yang efektif oleh dewan direksi untuk membentuk tata kelola yang baik nyatanya belum sepenuhnya berjalan efektif dikarenakan komite audit menjalankan fungsinya sebatas untuk mengikuti aturan regulator. Oleh dari itu ada tidaknya karakteristik komite audit sangat memungkinkan komite audit sepenuhnya belum mampu membantu perusahaan mengatasi masalah keuangan maupun yang tidak mengalami masalah krisis keuangan karena komite audit menjalankan sebatas menghindari hukuman dari pihak regulator. Namun disisi lain keberadaan komite audit di Indonesia tidak berhubungan secara penuh bagi perusahaan *financial distress* karena posisinya sebatas memberi pendapat. Sehingga bagi perusahaan *financial distress* dalam hal ini menunjukkan pentingnya menunjuk peran auditor eksternal yang berkualitas untuk memperkuat tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektifitas monitoring unsur akuntansi, pengendalian internal dan sistem operasional perusahaan.

Pemelitian ini memiliki keterbatasan pada Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian cukup singkat yaitu 3 tahun sehingga memungkinkan hasil penelitian ini kurang dapat memberi hasil *financial distress* secara akurat, banyak perusahaan yang tidak menampilkan laporan profil anggota komite audit secara jelas dan lengkap laporan tahunan sehingga penulis terbatas oleh informasi yang ada untuk menentukan tingkat independensi dan *literacy*. Sedangkan pada frekuensi rapat, beberapa perusahaan tidak menyatakan jumlah frekuensi rapat dalam setahun tetapi menyatakan rapat dilakukan secara rutin atau periodik sehingga pernyataan tersebut tidak dapat menjadi penilaian penelitian, data variabel independen yang terinput berdasarkan data yang diungkapkan dalam *annual report*, sehingga ada kemungkinan tidak mampu menangkap dengan tepat efektifitas komite audit jika perusahaan tidak mengungkapkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pengukuran rentang waktu pada proksi *financial distress* berdasarkan penelitian Ahsan (2013) *net income* negatif dalam 1 tahun, *working capital* negatif dalam 1 tahun maupun kedua-dua yaitu (*net income* dan *working capital*) negatif dalam 1 tahun menjadi kurang akurat untuk penilaian kategori *financial distress*.

Untuk menentukan *financial distress* disarankan agar tidak hanya terbatas pada 4 penilaian saja seperti *net income* negatif dan *working capital* negatif, EBITDA lebih kecil dari beban bunga dan turunnya *Market value* tetapi menggunakan tambahan berbagai literatur yang mendukung jumlah penilaian pada *financial distress*. Pada penelitian selanjutnya dapat

menambahkan nilai buku ekuitas negatif selama 1 tahun dan mengalami merger (Amalia;2004) atau pengukuran fungsi diskriminan *Z score* Altman yang diadaptasi oleh McKeeown *et.al.* (1991), Hoopwood *et.al.* (1994), Mutchler *et.al.* (1997).

Sampel penelitian selanjutnya diharapkan tidak terbatas pada badan usaha manufaktur tetapi memperluas sampel dari berbagai sektor lainnya agar dapat menggambarkan kondisi saat itu dan digunakan oleh berbagai perusahaan sebagai dasar penilaian. Diharapkan menggunakan masa periode penelitian yang lebih panjang agar pengukuran kondisi perusahaan lebih akurat sebab pada penelitian ini menggunakan rentang waktu 3 tahun (2010-2012) saja dan akan berbeda hasilnya apabila sampel dan waktu yang digunakan juga berbeda. Pengelompokan *distress* atau *non distress* tidak hanya didasarkan pada data satu periode saja, tetapi bisa dipantau sejak beberapa periode sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L.J., Parker, S. and Peter, G.F. (2004). ***Audit committee characteristics and restatements Auditing***. A Journal of practice & Teory, Vol 23 No.1 ,PP 69-87.
- Ahsan H et.al,(2012). ***Financial Distress, Earning Management and Market Pricing of Accruals During The Financial Crisis***. Managerial Finance Vol. 39 No 2,PP 155 – 180. 2013. Emerald Insight.
- Amalia L (2003). ***Ananlisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta***.journal Vol 7.No 2 p 183-208.
- BAPEPAM & LK (28 November 2008). ***PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PENYUSUNAN PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL*** Kep- 496/BL/2008. Nomor IX-17. Diakses November 2013. Diambil dari www.bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/peraturan.../ix/ix.i.7.pdf
- BAPEPAM & LK (7 Desember 2012). ***PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT***. NOMOR: KEP-643/BL/2012. Nomor IX.I.5. Diakses November 2013. Diambil dari http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2012/pdf/press-release-IX.I.5.pdf
- Baxter, P. (2010). ***Factors associated with the quality of audit committees***. *Pacific Accounting Review* , Vol. 22 Iss: 1 pp. 57-74.
- Brigham E.P, Daves P.H, (2010). *Intermediate Financial Management*. Tenth edition, South Western Cengage Learning. USA
- Bronson N.S. et al (2009). ***Are Fully Independent audit Committees Really Necessary?*** .Account Public policy 28 P265-280. Elsevier Inc. All rights reserved.
- Efferin.S,et.al. (2004). ***Metode penelitian untuk Akuntansi, sebuah pendekatan praktis***. Malang Banyumedia Publishing 2004.

- Ellen, Juniarti. (2013). ***Penerapan Good Corporate Governance, Dampaknya terhadap Prediksi Financial Distress Pada sector Aneka Industri dan barang konsumsi.*** Bussinnes Accounting Riview. Uiversitas Kristen Petra. Vol 1.No 2.PP 1-13.
- Emery D.R et.al. (2007) . ***Corporate Financial Manaegement*** . Pearson Prentice Hall. USA.
- Fello, Andrew J. dan Steven A. Solieri. (2008). ***Are all audit committee financial experts created equally?*** .International Journal of Disclosure and Governance Vol. 6,2, 150-166.
- Forum Corporate Governance in Indonesia (2002). ***“Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance(Tata Kelola Perusahaan)”***. Jilid 2 . Jakarta:FGCI.
- Ghozali I, (2002), ***Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS / 2 nd*** . Semarang, Universitas Diponegoro. 2001.
- Ghozali I, (2009), ***Analisis Multivariate Lanjutan Dengan Program SPSS*** . Semarang, Universitas Diponegoro. 2009.
- Godfrey,J, et.al (2010). ***Accounting Theory***. Seventh edition (2010), John Wiley & Sons Australia,Ltd.
- Hiro Tugiman, (1995), ***standar professional Internal audit***, PT. Eresco, Bandung (1999), Sekilas: Komite Audit, PT. Eresco, Bandung. PP 8-11.
- Ilya. Kamis,18 Juli 2013. ***OJK Akan Batasi Rangkap Jabatan Komite Audit***. Diakses November 2013. Diambil dari <http://akuntanonline.com/showdetail.php?mod=art&id=616&t=OJK%20Akan%20Batasi%20Rangkap%20Jabatan%20Komite%20Audit&kat=Organisasi>
- Indonesian Commercial Newsletter. ***Outlook 2011 and 2012 Manufacture*** .Diambil pada tanggal 22 Juni 2014.
<http://www.datacon.co.id/Outlook-2011Manufaktur.html>
<http://www.datacon.co.id/Outlook-2011Manufacture.html>
<http://www.datacon.co.id/Outlook-2012Industri.html>
- Kamaludin, Karina A.P.(2011). ***Prediksi Financial Distress Kasus Industri Manufaktur Pendekatan Model Regresi Logistik***. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu. September 2011.Vol 1.No 1. Pp 11-23.
- Kementrian perindustrian Indonesia. ***Perkembangan Pelaksanaan Perdagangan ACFTA tahun 2010 di Sektor Industri***.Diambil dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/42/Perkembangan-Pelaksanaan-Perdagangan-ACFTA-Tahun-2010--Di-Sektor-Industri>. Pada tanggal 22 Juli 2014.
- Komite Nasional Kebijakan Governance.2006. ***Pedoman Umum Good Corporate Governance***.
- Leung P, Cooper B.J (2003). ***The Mad Hatter's Corporate Tea Party***. Managerial Auditing Journal,P505-516. Australia.Emerald Insight.

- MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) Jawa Timur. ***IKAI Dorong Perusahaan Publik Lengkapi Komite Audt.*** Diambil dari www.mappijatim.or.id Pada tanggal 17 Februari 2014.
- Nur.E.DP, (2007). ***Analisis Pengaruh Praktek Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kesulitan Keuangan Perusahaan: Suatu Kajian Empiris.***Jurnal Bisnis dan Akuntansi.Universsitas Riau. April 2007.Vol 9.No 1.PP 88-108.
- Nuresa A, Basuki H (2013). ***Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Financial Distress. Journal of Accounting.*** Vol 2. No 2. PP 1-10. Universitas Diponegoro
- Pindado et.al. (2008). ***Estimating Financial Distress Likelihood.*** Journal of Business Research No 61 (2008) PP 995 – 1003. Science Direct.
- Rahmat,M.M,Takiah,M.I, N.M, Saleh (2008). ***Audit Committee Characteristics in Financially Distressed and Non Financial Distressed Company.*** Managerial Auditing Journal, Vol 24 No 7.2009,pp 624-658.
- Richard B. Whitaker. 1999. ***The Early Stage of Financial Distress.*** Journal of Economics and Finance.Vol.23.no.2.p.123-133. Science Direct.
- Ross et.al (2010). ***Corporate Finance*** . Ninth Edition. Singapore. Mc Graw.Hill International Edition.
- Sanjaya I.P.S. (2008). ***Reaksi Pasar atas Informasi Pengumuman Pembentukan Komite Audit.*** Atmajaya Yogyakarta.Vol 15 No 1. April 2008.
- Tinoco M.H, Nick W. (2013). ***Financial distress and bankruptcy prediction among listed companies using accounting, market and macroeconomic variables.*** Journal International Review of Financial Analysis. Vol 30 pp 394–419. .2013 Elsevier Inc. All rights reserved.
- Turel,A (2010).***Timeliness of financial reporting in emerging capital markets: Evidence from Turkey.*** Munisch personal Repec Archive Paper No 29799: 1303-1732.
- Utama M, (2004). ***Komite Audit ,Good Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi.*** Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Departemen AkuntansiFEUI. Vol 1. PP 61-79
- Xia Li and Jun Wang.(2008) ***Ownership, Independent Directors, agency cost and Financial distress.*** Emerad, Vol 8No 5,2008 Hlm 622-636.
- Wahana Komputer (2012). ***Solusi Praktis & Mudah Menguasai SPSS 20 untuk Pengelolaan Data.*** ANDI Yogyakarta,2012.
- Wahana Komputer (2012). ***Shortcourse Series SPSS 20.*** ANDI Yogyakarta,2012.
- Zhang, Yan,Jian Zhou dan Nan Zhou.(2006). ***Audit committee quality, auditor independence, and internal control weaknesses.*** Journal of Accounting & Public policy vol 26 No 3, pp300-27.
- Zarkasyi M.W (2008). ***Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur ,Perbankan, Dan Jasa Keuangan Lainnya.*** Oktober 2008. PP 17-22. ALFABETA, Bandung.